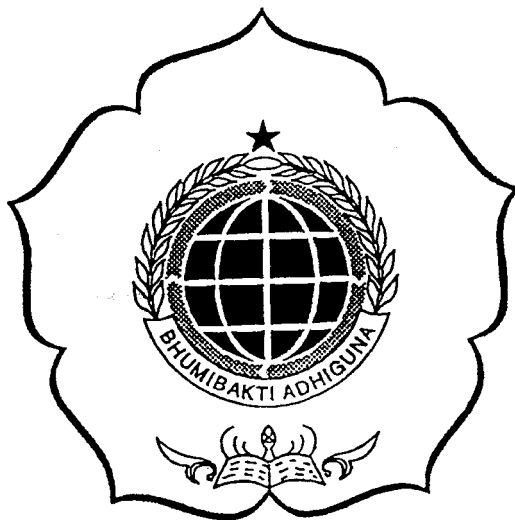


**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA  
GUNA MENDUKUNG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN  
DI DESA KEDUNGWINGUN KECAMATAN KLIRONG  
KABUPATEN KEBUMEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV  
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Disusun oleh :

**AGUS SETIYADI**

**NIM : 9650958**

## INTISARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan cara pengarsipan administrasi pertanahan di desa serta peranan Kepala Desa beserta perangkatnya dalam menunjang penyelenggaraan administrasi pertanahan di desa.

Metode yang digunakan adalah Deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data skunder dan data primer yang pengumpulan datanya menggunakan cara studi dokumentasi, wawancara dan kuisisioner yang disebarakan kepada responden. Populasi penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga (kk) yang memiliki hubungan hukum dengan tanah dan sampel yang diambil sebanyak 100 (seratus ) kepala keluarga (kk).

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penyajian dan analisis data dalam skripsi ini adalah bahwa pelaksanaan administrasi pertanahan di Desa Kedungwinangun belum dapat dilaksanakan dengan baik (tertib) dikarenakan adanya kelemahan dalam tanggung jawab dan pengadministrasiannya dimana tanggung jawab dari segi yuridis dan segi fisik dipegang sepenuhnya oleh Sekretaris Desa, cara pengarsipan masih menggunakan cara lama dan sederhana serta tidak didukung oleh fasilitas yang memadai sehingga kurang menjamin keamanan dan keutuhan arsip-arsip warkah-warkah pertanahan. Disamping itu peranan Kepala Desa beserta Perangkat Desa belum dapat berjalan dengan sepenuhnya, baru terlihat dari adanya upaya mengadakan penyuluhan di desa dan upaya untuk menyelesaikan masalah pertanahan yang ada. Dalam kegiatan pendaftaran tanah masih kurang hal ini terlihat dari kondisi pensertipikatan tanah yang ada di Desa Kedungwinangun baru mencapai 15,6 %.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
INTISARI .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Kegunaan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
1. Pendekatan Penelitian .....	5
2. Daerah Penelitian .....	6
3. Populasi .....	6
4. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	6
5. Pengumpulan Data .....	9
6. Sajian Data .....	10
7. Teknik Analisis Data .....	11

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka .....	12
B. Kerangka Pemikiran.....	16
C. Anggapan Dasar .....	19
D. Batasan Operasional .....	19

## BAB III. GAMBARAN UMUM DESA KEDUNGWINANGUN

A. Letak dan Batas Desa Kedungwinangun.....	22
B. Penggunaan Tanah Desa Kedungwinangun .....	22
C. Keadaan Penduduk Desa Kedungwinangun.....	24

## BAB IV. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Keadaan Responden .....	27
B. Administrasi Pertanahan Desa Kedungwinangun .....	33
C. Pembahasan .....	38
1. Prosedur dan Cara Pengarsipan Administrasi Pertanahan.....	38
a. Prosedur Administrasi Pertanahan .....	38
b. Cara Pengarsipan Administrasi Pertanahan .....	41
2. Peranan Kepala Desa beserta Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan .....	44

## BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran.....	49

## DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah sangat penting bagi kebutuhan manusia, maka seringkali timbul permasalahan-permasalahan bila ada usaha yang berhubungan dengan tanah. Permasalahan di bidang pertanahan timbul antara lain karena kurang atau tidak jelasnya status hak atas tanah, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Herutomo Soemadi, yaitu :

“Keadaan administrasi tanah dan status hukum atas tanah yang belum tertib, dianggap sebagai faktor yang mendorong membuka peluang-peluang untuk praktek penyimpangan atau pengusahaan tanah yang tidak dengan usaha-usaha pembangunan ekonomi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan usaha mewujudkan kesejahteraan materiil dan spirituil” (Herutomo Soemadi, 1986 : 14).

Untuk mengurangi kemungkinan adanya permasalahan di bidang pertanahan, pemerintah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Menyadari makin kompleksnya masalah di bidang pertanahan, khususnya yang menyangkut pada pengelolaan administrasi pertanahan, maka dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional jo. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 Tentang Badan Pertanahan, dinyatakan bahwa :

“Badan Pertanahan Nasional bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria maupun peraturan perundangan yang lain yang meliputi penggunaan, penguasaan dan

Selanjutnya dalam Pasal 3 point d surat keputusan ini, dinyatakan pula bahwa :

“Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi :

(d) melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan”.

Secara fungsional, administrasi pertanahan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan yang struktur organisasinya tidak sampai ke tingkat desa. Unit organisasi Badan Pertanahan secara berjenjang berada di pusat, propinsi dan kabupaten/kota dimana pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan tidak ada tenaga pertanahan maupun organisasinya.

Di masa lampau, sewaktu instansi agraria masih merupakan bagian dari Departemen Dalam Negeri, pernah dipikirkan adanya unit instansi agraria sampai ke tingkat kecamatan dan tenaga administrasi (tata usaha) di bidang pertanahan sampai ke tingkat desa/kelurahan. Pemikiran tersebut sampai saat ini belum terwujud sehingga penanganan administrasi pertanahan di desa/kelurahan dari segi ketatausahaan belum ada keseragaman.

Pernyataan di atas jelas mengisyaratkan bahwa masih perlu penataan administrasi pertanahan khususnya di pedesaan secara lebih terprogram, tertib dan teratur.

Keberhasilan penanganan bidang pertanahan tidak terlepas dari keterlibatan aparat pihak desa dalam mendukung kegiatan ini. Oleh karena itu peranan desa sangat dibutuhkan.

Keterlibatan pihak desa dalam pengurusan bidang pertanahan terlihat dalam kegiatan mengeluarkan atau memberikan pengesahan surat-surat penting yang berkaitan dengan tanah, seperti dalam memberikan pengesahan. Surat Pernyataan Tanah tidak dalam keadaan sengketa atau jaminan, Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas, Surat Keterangan Pemilikan/Model A, Salinan Buku Pemeriksaan Desa dan Kutipan Letter C Asal, Bukti lunas PBB, Surat Keterangan waris, Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan lain-lain.

Keadaan yang demikian tentunya perlu didukung dengan sistem administrasi yang memadai mengingat warkah atau berkas tanah merupakan arsip hidup, maka agenda dan arsip surat yang berhubungan masalah tanah perlu dipisahkan tersendiri. Disamping itu perlu diketahui pula jenis-jenis pekerjaan di desa yang berhubungan dengan pertanahan dan bilamana perlu dibuatkan bagan alir penyelesaian pekerjaan tersebut.

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, penyusun sangat tertarik untuk mengadakan penelitian serta ingin menelaah lebih lanjut mengenai administrasi pertanahan desa. Untuk keperluan ini diangkat judul skripsi :

**"Pelaksanaan Administrasi Pertanahan Desa Guna Mendukung Tertib Administrasi Pertanahan di Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen".**

## **B. Rumusan Masalah**

Administrasi pertanahan yang dilaksanakan di desa bukan suatu

kegiatan lain dan bukan administrasi yang pelaksanaannya berada di bawah Badan Pertanahan secara langsung. Sehingga data, naskah dan pencatatan yang dilaksanakan tidak memenuhi seluruh kebutuhan dan kriteria yang ditetapkan bagi Badan Pertanahan.

Padahal apabila pelaksanaan administrasi pertanahan desa menjadi bagian dari administrasi di lingkungan Badan Pertanahan, akan dapat mengurangi permasalahan yang ada disamping memudahkan pengawasan terhadap bidang pertanahan.

Administrasi merupakan bentuk perbuatan yang sangat mendukung bagi tercapainya tujuan, maka harus dibuktikan dengan adanya suatu pembukuan, alat-alat pendukung serta perangkat-perangkat lain. Seperti dikemukakan oleh H. Moefitje Wiriadihardja bahwa:

“Administrasi adalah salah satu sarana umum untuk menggerakkan kegiatan sekelompok manusia (termasuk alat-alat dan fasilitas) yang bekerja sama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu”. (H. Moefitje. W. , 1980 : 17).

Dengan demikian, administrasi pertanahan yang ada di setiap desa setidaknya berpedoman pada hal tersebut. Kenyataan yang ada di Desa Kedungwinangun saat ini, pada umumnya belum memperlihatkan keadaan seperti di atas, dimana pihak desa belum menguasai atau memahami dengan baik jenis-jenis pekerjaan apa saja yang berhubungan dengan pertanahan ditambah lagi dengan sistem administrasi yang kurang memadai.

Berdasarkan uraian tersebut, secara ringkas permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :



2. Bagaimana peranan Kepala Desa beserta perangkatnya dalam mendukung penyelenggaraan administrasi pertanahan di Desa Kedungwinangun ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### ***1. Tujuan penelitian***

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui prosedur dan cara pengarsipan administrasi pertanahan di Desa Kedungwinangun.
- b. Untuk mengetahui dengan jelas mengenai peranan Kepala Desa beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan di Desa Kedungwinangun.

#### ***2. Kegunaan penelitian***

Kegunaan dalam penelitian ini adalah :

- a. Penyusun dapat mengetahui dan memahami arti pentingnya prosedur dan cara pengarsipan administrasi pertanahan di Desa Kedungwinangun.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintahan desa setempat dalam rangka menentukan kebijaksanaan di bidang pertanahan khususnya dalam meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat Desa Kedungwinangun.

### **D. Metode Penelitian**

#### ***1. Pendekatan penelitian***

Desa beserta perangkatnya dalam menyelenggarakan administrasi pertanahan. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif.

Berkaitan dengan metode ini, Moch. Nasir telah menggambarkan deskriptif tersebut sebagai berikut :

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki” (Moch. Nasir, 1988 : 63).

## ***2. Daerah penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, mengingat bahwa Desa Kedungwinangun merupakan wilayah pedesaan yang cukup potensial untuk dikembangkan. Disamping itu di Desa Kedungwinangun belum pernah diadakan penelitian mengenai administrasi pertanahan.

## ***3. Populasi***

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga (kk) Desa Kedungwinangun yang memiliki tanah atau hak atas tanah, sebagaimana dijelaskan oleh Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (1996 : 125) bahwa populasi atau universe ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga.

## ***4. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel***

Menurut Suharsimi Arikunto (1998 : 117), sampel adalah sebagian

Sampel yang digunakan oleh penulis sebanyak 100 kepala keluarga (kk) yang diambil dari seluruh kepala keluarga (kk) yang memiliki tanah atau hak atas tanah.

Metode Proporsional Random Sampling yang dimaksud adalah pengambilan sampel dari setiap dusun dilakukan secara acak dan ditentukan seimbang atau sebanding dengan banyaknya jumlah kepala keluarga (kk) yang ada pada masing-masing dusun. Banyaknya sampel atau responden tiap-tiap dusun ditentukan dengan cara membagi jumlah populasi kepala keluarga (kk) di dusun dengan jumlah populasi kepala keluarga (kk) di desa, kemudian hasilnya dikalikan dengan jumlah sampel yang digunakan. Secara matematis dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$n_i = \frac{N_i}{\sum N_i} \times \sum n_i$$

Keterangan :

$n_i$  = Jumlah sampel atau responden dusun  $i$

$\sum n_i$  = Jumlah sampel atau responden yang digunakan

$N_i$  = Jumlah populasi (KK) di dusun  $i$

$\sum N_i$  = Jumlah populasi (KK) di Kelurahan  $i$

$i$  = Dusun 1 sampai dusun 8

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka banyaknya responden tiap

## 1. Dusun Karang Miri

$$\frac{132}{919} \times 100 = 14$$

## 2. Dusun Kedungwaru

$$\frac{120}{919} \times 100 = 13$$

## 3. Dusun Perna

$$\frac{100}{919} \times 100 = 11$$

## 4. Dusun Sasak

$$\frac{55}{919} \times 100 = 6$$

## 5. Dusun Entak

$$\frac{175}{919} \times 100 = 19$$

## 6. Dusun Grewing

$$\frac{136}{919} \times 100 = 15$$

## 7. Dusun Pedana

$$\frac{107}{919} \times 100 = 12$$

## 8. Dusun Pagak

$$\frac{94}{919} \times 100 = 10$$

### 5. *Pengumpulan Data*

#### *a. Sumber Data*

- 1). Data primer adalah data yang langsung diambil dari sumbernya dan bukan merupakan data yang telah diolah oleh peneliti lain. Data ini diperoleh dari :
  - a. Responden sebagai informan data tentang tanda bukti pemilikan tanah, cara perolehan tanah, penyuluhan bidang pertanahan, pengurusan tanah di kantor desa dan alasan responden untuk mensertipikatkan tanah.
  - b. Kepala Desa/Sekretaris desa sebagai informan data tentang penguasaan dan pemilikan tanah di desa, administrasi pertanahan di desa (pencatatan, pengumpulan dan pelaporan data mengenai pendaftaran, permohonan dan peralihan hak atas tanah) serta peran Pemerintah Desa dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan administrasi pertanahan desa.
  - c. Kepala Urusan Pemerintahan sebagai informan data tentang dokumen arsip-arsip serta warkah-warkah pertanahan di kantor desa.
- 2). Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang telah tersedia dari hasil pengumpulan data orang lain baik instansional ataupun penelitian orang lain. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

b. Data kependudukan, yaitu :

1. Jumlah penduduk tiap dusun Desa Kedungwinangun
2. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

### ***b. Teknik Pengumpulan Data***

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan cara :

1. Studi dokumentasi yaitu melalui studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian serta mempelajari dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan dengan materi penelitian.
2. Interviu atau wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada masyarakat dan Kepala Desa beserta perangkatnya.
3. Kuisisioner yang bersifat kombinasi tertutup dan terbuka. Maksudnya dari dua kombinasi kuisisioner ini adalah jawaban dari pertanyaan terbuka yang jawabannya belum ditentukan (Masri Singaribun, 1996 : 132).

### ***6. Sajian Data***

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data gambaran umum wilayah penelitian dan data utama. Data yang diambil adalah sebagai berikut :

- a. Data lokasi daerah penelitian yang meliputi : letak dan batas wilayah Desa Kedungwinangun disajikan dalam bentuk peta.

- c. Data kependudukan yang meliputi : jumlah penduduk tiap dusun Desa Kedungwinangun dan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan disajikan dalam bentuk tabel.
- d. Data keadaan responden yaitu : identitas responden, tanda bukti pemilikan tanah responden, cara perolehan tanah responden, penyuluhan bidang pertanahan, pengurusan tanah responden di kantor desa dan alasan untuk mensertipikatkan tanah yang disajikan dalam bentuk tabel.
- e. Data administrasi pertanahan desa yang meliputi : status tanah, tanah-tanah yang telah bersertipikat, identitas transaksi/mutasi pemilik/penguasaan tanah dan pemecahan pemilikan penguasaan tanah yang disajikan dalam bentuk tabel.
- f. Data jenis-jenis warkah : putusan desa, pemeriksaan desa, letter C dan Letter D disajikan dalam bentuk tabel.
- g. Data masalah pertanahan disajikan dalam bentuk deskriptif.

### **7. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis tabulasi, yaitu data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel, disamping itu juga menggunakan metode deskriptif yaitu data yang tersedia dari berbagai sumber, baik hasil wawancara, kuisisioner, pengamatan yang sudah ada dalam catatan lapang, dokumen dan sebagainya diinterpretasikan secara deskriptif sehingga dapat menarik suatu kesimpulan yang rasional.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian pembahasan pada bagian penyajian dan analisis data, maka dapat disimpulkan mengenai beberapa hal antara lain :

1. Pelaksanaan administrasi pertanahan yang ada di Desa Kedungwinangun, Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen belum dapat dilaksanakan dengan baik (tertib) karena adanya kelemahan dalam tanggung jawab dan prosedur pengadministrasiannya dimana pelaksanaan pertanggungjawaban dari yuridis ditangani oleh Sekretaris Desa dan segi fisik oleh Kepala Urusan Pemerintahan tidak terlaksana, semuanya diambilalih/dilaksanakan oleh Sekretaris Desa. Selain itu terdapat keterbatasan kemampuan tenaga pelaksanaan administrasi pertanahan dan masih belum adanya ketentuan yang mendasar mengenai keseragaman administrasi pertanahan di desa. Cara pengarsipan administrasi pertanahan yang ada di Desa Kedungwinangun belum baik karena masih menggunakan cara lama yaitu berdasarkan jumlah urutan data yang tersimpan dan sederhana yaitu hanya menggunakan 2 buku register yang memuat segala macam urusan mengenai tanah. disamping itu fasilitas yang digunakan masih sangat terbatas sehingga kurang menjamin keamanan dan keutuhan arsip-arsip dan warkah-warkah pertanahan.



2. Peranan Kepala Desa beserta Perangkat Desa belum dapat berjalan sepenuhnya dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan hal ini terlihat dari peranan yang telah dilaksanakan hanya upaya untuk mengadakan penyuluhan pertanahan dan upaya penyelesaian masalah yang terlihat telah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan dalam peranannya dalam kegiatan pendaftaran tanah masih kurang hal ini terlihat bahwa kondisi pensertipikatan tanah yang ada baru mencapai 15.6 %

## **B. Saran-saran**

Berkaitan dengan hasil analisis dan kesimpulan, untuk meningkatkan pelaksanaan administrasi pertanahan maka penyusun pada kesempatan ini mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Untuk menertibkan pelaksanaan administrasi pertanahan di Desa Kedungwinangun perlu dilaksanakan pembagian tugas dan wewenang dalam prosedur pengadministrasiannya dan menggunakan sistem beberapa buku register menurut jenis hak, status, perbuatan hukum atas tanah serta register untuk catatan lain yang berkaitan dengan tanah. Adapun mengenai cara pengarsipan sebaiknya dilakukan pengarsipan berdasarkan letak tanah (dusun), tahun dan jenis perbuatan hukumnya dengan menggunakan tempat pengarsipan berupa lemari yang tersusun berdasarkan urutan tersebut diatas.
2. Agar peran Kepala Desa beserta perangkatnya lebih ditingkatkan lagi, khususnya dalam menggerakkan minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya melalui prona swadaya.

3. Perlu adanya peningkatan kemampuan aparat/tenaga pelaksana administrasi pertanahan dan bila perlu ada aparat/petugas Badan Pertanahan yang bertugas di desa guna dapat memberikan arahan dan sebagai monitoring pelaksanaan administrasi pertanahan di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1998), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi IV)*, Jakarta : P.T. Rineka Cipta.
- Daging, I. Made. (1996). Peranan Desa dalam Mendukung Percepatan Pensertipikatan Tanah (Sebagai Suatu Tinjauan Umum). *Makalah disampaikan pada Seminar sehari Pertanahan, STPN Yogyakarta.*
- Hetarie, Inyo Cancer. (1996). Pengaruh Pengetahuan Hukum Pertanahan Kepala Desa dalam Menunjang Tertib Hukum Pertanahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. *Makalah disampaikan pada Seminar sehari Pertanahan, STPN Yogyakarta.*
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Catur Tertib Pertanahan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2000.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun tahap : Ke-5 BPN.
- Nasir, Moh. (1988). *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1984), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : P.N. Balai Pustaka.
- Soemadi, Herutomo. (1986). *Diktat Kuliah Tata Guna Tanah II*. Akademi Agraria Departemen Dalam Negeri, Yogyakarta.
- Saparin, Sumber. (1986), *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintah Desa*, Jakarta : Ghalia Indah.
- Singarimbun, M dan Sofyan, E. (1996). *Metode Penelitian Survei*, Jakarta :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Walijatun, Joko. (1997). "Administrasi Pertanahan Desa". *Makalah pada Seminar Nasional (Studi Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan)*. STPN Yogyakarta.

Widjaja, A.W. (1993). *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Wiriadihardja, H. Moeftie. (1980). *Pedoman Administrasi Umum*, Jakarta : Balai Pustaka.